

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum Desa Selemak

Desa Selemak adalah nama suatu wilayah di kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat dulunya desa ini banyak pokok besar yaitu pohon keremak dan dibawah pohon tersebut banyak ditempati para pedagang yang berasal dari Rao yang kemudian menjadi beberapa bagian tempat tinggal dan setelah perluasan kampung wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah desa yang pada saat itu menjadi sebuah nama Desa Selemak.

Desa Selemak kecamatan Hampan Perak mempunyai organisasi Pemerintah Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa. Kepala urusan pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, dan Bendahara Desa. (*sumber kantor desa selemak 2019*)

Demikian Pemerintahan Desa Selemak berjalan dan berlangsung sampai dengan sekarang. Dari kepala kampung hingga sampai sebutan kepala desa, nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Nama-Nama Kepala Desa Selemak

No	Nama	Masa Jabatan
1	Zakaria	1945 s/d 1963
2	Asa'ri	1963 s/d 1973
3	Usman zen	1973 s/d 1981
4	Jalaluddin hs	1981 s/d 2001
5	Sukram (Pjs)	2001 s/d 2003
6	Sulaiman	2003 s/d 2008
7	Faisal S. Pd	2008- 2009
8	Sulaiman	2009 s/d 2015
9	Faisal S. Pd	2015-2016
10	Rohmad	2016-2021

(Sumber : Kantor Kepala Desa Selemak Tahun 2019)

4.1.2 Letak Geografis

Wilayah Desa Selemak merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, dengan dataran rendah yang berada diantara 0-10 meter diatas permukaan laut, yang sebagian besar arealnya ditanamin oleh penduduk dengan tanaman Holtikultura dan palawija. Dengan luas wilayah ± 70 Ha. Atau 0,70 Km persegi terdiri dari 3 dusun.

Desa selemak merupakan daerah urban yang berbatasan dengan kota medan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hampan Perak
- Sebelah Selatan bertabatasan dengan Desa Klupang Kebun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Medan
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Klambir

4.1.3 Orbitasi

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : $\pm 0,5$ Km

- Jarak dari Ibu Kota Pemkam Deli Serdang : ± 41 Km
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara : ± 21 Km

4.1.4 Demografi Desa Selemak

Penduduk Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak, pada akhir tahun 2015 memiliki jumlah penduduk :

Tabel 4.1.3
Jumlah Penduduk Desa Selemak

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah L+P
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	199	422	401	823
2	Dusun II	298	500	519	1.019
3	Dusun III	275	550	610	1.160
Jumlah		723	1.472	1.530	3.002

(sumber : Kantor Kepala desa selemak 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Selemak pada akhir tahun 2015 jumlah penduduk terdaftar sebanyak 3.002 jiwa yang terdiri dari 732 kepala keluarga.

4.1.5 Agama

Seperti halnya di desa selemak bahwa agama terbesar yang dianut masyarakat Desa Selemak adalah agama Islam. Masyarakat Desa Selemak hampir 100% masyarakat beragama Islam. Data mengenai agama dan jumlah penganut di Desa Selemak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.4
Agama yang Dianut Masyarakat di Desa Selemak

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.463	1.518
Protestan	6	10
Katolik	-	-

Hindu	-	-
Budha	3	2
Khonghuc u	-	-
Total	1.472	1.530

(sumber :Kantor Kepala desa selemak 2019)

Dari tabel di atas, Agama Islam menjadi mayoritas agama yang paling banyak mencapai 1.463 orang laki-laki dan perempuan berjumlah 1.518 orang, sedangkan agama minoritas yang paling sedikit yaitu budha berjumlah 5 orang yang di dominasi oleh laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan 2 orang.

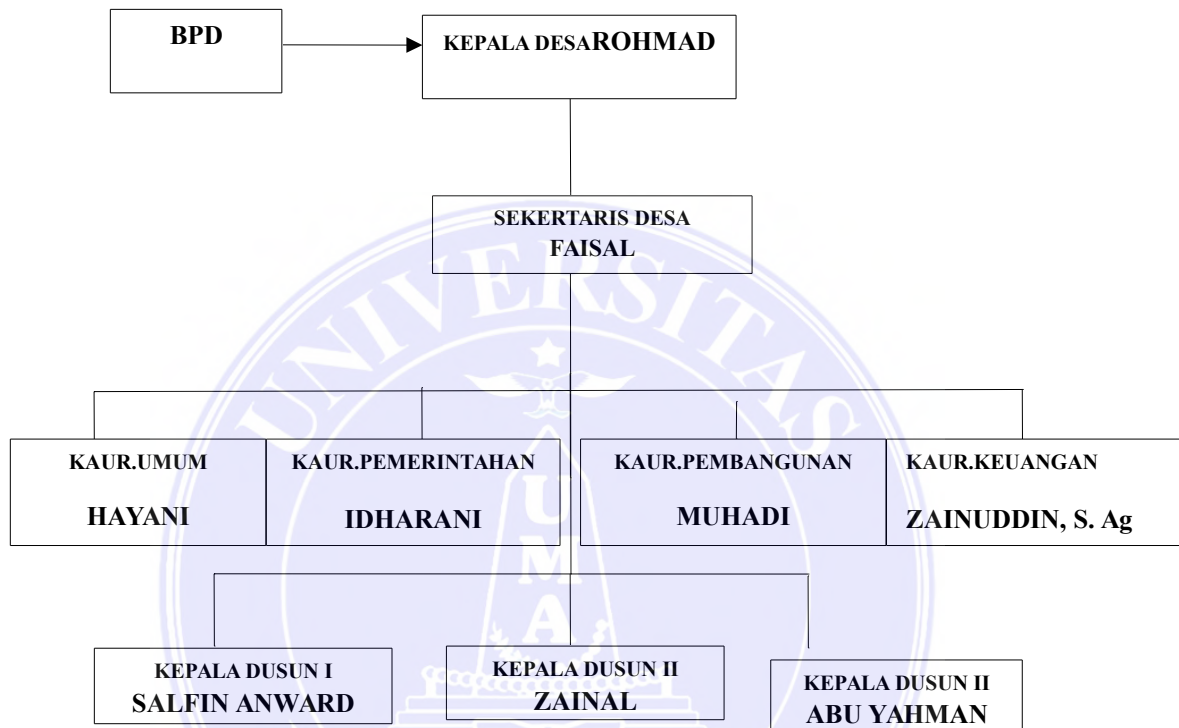
4.1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah salah satu fungsi pembagian kerja atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan unsur-unsur organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku untuk mencapai tujuan sasaran yang didukung oleh sarana dan prasarana. Organisasi dalam perusahaan merupakan tempat untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan dalam menetapkan tanggungjawab dalam suatu badan atau inti usaha guna terealisasinya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan secara skematis penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman dan keahlian. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kantor, staf, dan pegawai, sehingga mereka mengetahui kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pegawai dapat mengerjakan tugas yang telah dibebankan kepadanya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Adapun struktur organisasi pada kantor Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

**BAGAN 4.1 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
DESA SELEMAK
KEC. HAMPARAN PERAK KAB. DELI SERDANG**



(sumber : Kantor Kepala desa selemak 2019)

4.1.7 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pilkada (KPPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL.
 - c. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
 - d. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS

- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara dll.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggara pemungutan suara dan perhitungan suara adalah
 - a. Memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas TPS,
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara,
 - c. Mendatangi surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT,
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta pemilihan di tingkat desa/kelurahan dll
 3. Tugas ketua KPPS dalam rapat perhitungan suara di TPS sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan perhitungan suara
 - b. Mendatangi berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS,
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
 - d. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan PPL
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan alat kelengkapan pemungutan suara.
 4. Persyaratan Calon Anggota KPPS dan Pembentukan KPPS
 1. Syarat untuk menjadi anggota KPPS yaitu
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada masa penyerahan berkas calon anggota KPPS
 - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - d. Tidak menjadi anggota Partai Politik dan tidak menjadi tim kampanye maupun tim sukses lainnya.
 - e. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
 - f. Mampu secara jasmani dan rohani
 - g. Tidak pernah dipidana penajra
 - h. Belum pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU.

4.2 Hasil Penelitian dan Wawancara.

4.2.1 Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Menurut Budiarjo Miriam (2008:367) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah

“ kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.”

Di negara-negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan demokrasi pada negara tersebut sudah berjalan dengan baik dan tetap dipercaya oleh warga negara. Dalam kontes lain, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa warga negara terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, baik yang aktif maupun pasif. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu juga menunjukkan sejauh mana proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya, ada anggapan bahwa rendahnya partisipasi

politik disuatu negara dianggap kurang baik bagi demokrasi karena memperlihatkan kurangnya perhatian dan kepedulian warga negara pada masalah politik. Gejala politik memang bukan semata-mata dipengaruhi oleh warga yang tidak peduli pada masalah politik, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kekecewaan politik, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal diatas maka hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal

selaku Sekertaris desa selemak mengatakan :

“Salah satu faktor rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak kalau menurut saya mungkin lebih karena masyarakat merasa bosan dan juga kekecewaan dengan pilkada karena tidak bisa merubah apa pun, kebanyakan masyarakat mengatakan dengan datang ke TPS hanya buang-buang waktu mereka sedangkan siapa pun yang jadi pemenang tidak memberikan keuntungan bagi mereka, sehingga banyak masyarakat tidak datang ke TPS mereka lebih memilih beristirahat di rumah.”(Wawancara 7 Februari 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Norma selaku ibu rumah tangga mengatakan :

“Adanya kekecewaan terhadap pihak yang bertugas untuk mengumpulkan KTP banyak masyarakat yang tidak tahu dan juga terlambat informasi baru disampaikan sudah tiba harijanya pilkada, sehingga masyarakat yang datang ke TPS yang belum ngumpulkan KTP harus antrian menunggu sampai selesai, sehingga masyarakat banyak yang tidak ikut memilih pada saat itu.”(Wawancara 12 februari 2019)

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah disetiap daerah berbeda-beda dan beragam, ada yang tingkat partisipasinya tinggi dan ada juga yang rendah, hal itu dipengaruhi oleh status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua pengalaman berorganisasi dan kesadaran dari pemilih. Pemilihan kepala daerah yang terjadi diberbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada dimasing-masing daerah, termasuk di desa Selemak. Harapan dari pilkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik

rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitanya dalam pilkada masih ada banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi, dan hal ini pun terjadi Sumatera Utara khususnya di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak pada waktu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat dimaknai sebagai rasa kebosanan rakyat terhadap politik atau tidak adanya calon yang cukup menarik dan berkualitas yang ditunjuk oleh partai politik, sehingga tidak memberi harapan bagi perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2019 dengan ibu syahrini selaku KPPS Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak menyatakan bahwa :

“Faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat sebenarnya ada banyak selain dari adanya rasa bosan dan juga kecewa, menurut saya karena kurangnya kepedulian masyarakat tentang hak politik yang dimiliki, mereka berkata tidak ada manfaatnya menggunakan hak politik tersebut. Kadang-kadang juga masyarakat beranggapan suaranya cuma satu dan itu tidak akan berpengaruh jadi lebih baik saya tidak memilih dan memilih untuk bekerja.”

Hal tersebut diatas dibenarkan oleh ibu beyek selaku anggota masyarakat menyatakan bahwa :

“Pada saat adanya pilkada dirinya sendiri tidak ikut berpartisipasi pada saat itu, hal ini sebabkan sebagai adanya rasa kekecewaan pada pemimpin sebelumnya yang tidak dapat merubah keadaan apapun, sehingga dia tidak ikut memilih, dia mengakui lebih memilih pergi berladang dari pada ikut memilih pada saat itu.”

Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan kahir-akhir ini banyak yang dipelajari terutama dengan hubungannya dengan negara berkembang. Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan

negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan di mana dia berada. Apa bila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitas masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara. Pada hal yang sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik menurut James Rosenau dalam (Mukaram Zaenal 2016:213) terdiri atas dua bentuk. pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi), serta aktif

dalam kegiatan seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik dipemerintahan maupun diparlemen dan diluar parlemen.

Partisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik. Mereka itu disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam pradigma mekanistik.

Dari persepektif yang lain terdapat juga pendapat bahwa warga negara yang tidak ikut memilih misalnya, mungkin karena yakin keadaan sudah stabil dan siapapun yang terpilih tidak akan mengubah keadaan, justru itu warga negara yang disebut apatis itu, tidak berkonotasi negatif atau kecewa, melainkan sudah merasa puas dan percaya terhadap sistem politik yang ada.

Berdasarkan hal yang di atas dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2019 dengan bapak Faisal selaku Sekretaris Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa:

“masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada pilkada karena adanya kekecewaan, jenuh dan juga merasa bosan dengan namanya pilkada karena tidak adanya perubahan apapun, sehingga masyarakat tidak datang ke TPS pada saat pilkada.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Riki Saputra selaku pengawas TPS pada saat pemilu menyatakan bahwa :

“Masih banyak masyarakat yang tidak ikut memilih atau memberikan hak suaranya kepada salah satu calon, serta dia melihat masyarakat datang ke TPS tapi tidak ikut memilih, masyarakat hanya datang sebagai penonton saja tapi tidak ikut berpartisipasi”

Tabel 4.2
Jumlah Pemilih dalam Pilgub Sumut 2018
Di desa selemak

Pemilih	Menggunakan Hak pilih	Tidak Menggunakan Hak pilih
Laki-laki	599	330
Perempuan	648	351
Total	1.247	681

(Sumber : PPS Desa Selemak 2019)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Daftar Pemilih Tetap di Desa Selemak Kecamatan Hampanan Perak sebanyak 1.928 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih hanya 1.247 orang dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 599 orang dan pemilih perempuan sebanyak 648 orang. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sebanyak 681 orang yang terdiri dari 330 orang Pemilih laki-laki dan Perempuan 351 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 masih tergolong rendah.

Sesuai dengan hal diatas, hasil wawancara penulis pada tanggal 7 Februari 2019 dengan ibu beyek selaku anggota masyarakat desa selemak menyatakan :

“ Bahwa dirinya sendiri tidak ikut berpartisipasi pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dikarenakan kekecewaannya dan juga tidak adanya sosialisasi hanya saja surat undangan bahwasannya adanya pemilihan.”

Dalam hal kegiatan berpartisipasi, sebenarnya terdapat tiga sumber utama dari partisipasi politik yaitu : waktu, uang, dan *civic skills*. Waktu dan uang adalah investasi dengan banyak cara diantaranya melakukan kampanye, menulis surat kepada pihak berwenang, dan menghadiri pertemuan relevan. Sementara uang dapat digunakan untuk berdonasi kepada kandidat, partai, maupun organisasi politik. Sementara *civic skills* berhubungan dengan komunikasi dan kapasitas organisasional yang sangat penting dalam aktivitas politik. Keberadaan atau ketiadaan salah satu dari tiga faktor diatas akan berdampak pada perbedaan substansial dalam partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi politik dalam pemilu, memang bersifat sukarela. Sifat sukarela itu mengharuskan para politikus atau kandidat harus mampu ”membujuk” rakyat melalui komunikasi politik yang informatif, edukatif dan persuasif secara efektif. Para komunikator politik wajib membangun citra dan membentuk opini publik yang positif baginya agar rakyat suaranya kepada kandidat atau partisipasi politiknya. Demikian juga kesenjangan kolektoral harus dihapuskan dengan menjalin komunikasi langsung antara yang politikus yang mewakili dan rakyat yang diwakili.

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Herbert McCloky dalam Arifin Anwar (2011) dengan 1 dimensi saja yaitu :

1. Kampanye

Kegiatan kampanye politik tidak lepas adanya partai politik yang ikut mengusung dan mendukung berjalanya kegiatan kampanye politik. Partai politik

adalah suatu organisasi yang terstruktur dan memiliki ideologi tertentu yang dibentuk berdasarkan tujuan dan cita-cita politik yang diinginkan oleh para tokoh pendiri partai. Menurut Hafied Cangara (2016: 152-153) kampanye merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisasi dalam waktu tertentu. Kampanye politik dapat dilakukan oleh seorang atau kelompok orang atau organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat.

Kampanye politik merupakan suatu langkah yang sangat krusial yang membutuhkan penanganan secara matang, sebab jika tidak dipersiapkan dengan matang hasil suara pemilihan umum dapat berdampak fatal seperti kerugian waktu, biaya dan tenaga. Tujuan diadakan kampanye pemilihan umum adalah untuk membawa kandidat calon pemilu menduduki jabatan yang diinginkan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung.

Pengertian kampanye secara umum adalah sebuah proses komunikasi yang bertujuan mempromosikan, mengenalkan atau mempublikasikan kepada masyarakat. Pesan atau informasi dalam kampanye biasanya menitik beratkan pada keunggulan suatu produk atau jasa yang bersifat persuasif. Seperti halnya politik tanpa adanya kampanye maka seorang tokoh politik atau partai politik akan sulit dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan hal di atas maka hasil wawancara dengan bapak Mahmud selaku anggota masyarakat desa Selemak mengatakan :

“Bahwa kampanye atau sosialisasi sangat penting untuk diadakan supaya masyarakat tahu dan mengenal siapa yang akan dipilih, menurutnya kampanye memudahkan salah satu calon untuk mendapat dukungan dari masyarakat, kemudian dengan adanya kampanye masyarakat tahu apa yang menjadi visi dan

misi dari salah satu calon, tetapi pada kenyataannya sebelum pada saat pemilu belum ada kegiatan berupa sosialisasi yang dilaksanakan di desa ini, calon kepala daerah pun sama sekali belum ada melakukan pendekatan dengan masyarakat.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Eka selaku ibu rumah tangga menyatakan :

“Dirinya sendiri senang bila diadakan namanya kampanye atau sosialisasi karena dia tidak bisa membaca maka dengan adanya kampanye maka dia tahu siapa yang akan dipilihnya dan nomor berapa calon yang disenanginya, dia mengatakan dengan adanya kampanye dia tidak merasa bingung.”

Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitas masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara. Pada hal yang sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik menurut James Rosenau dalam Mukarom Zaenal (2016:213) terdiri atas dua bentuk. pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi), serta aktif dalam kegiatan seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi

dengan para pemimpin politik atau politikus, baik dipemerintahan maupun diparlemen dan diluar parlemen.

Kampanye politik para kandidat calon tokoh politik dalam pembentukan opini publik melalui proses komunikasi politik yang dimulai dari setiap opini individu. Setiap pesan atau masalah pembicaraan politik yang menyentuh individu itu dapat diterima dan ditolak oleh individu lainnya. Opini publik sebagai bentuk fenomena sosial dan politik khususnya dalam bidang kampanye politik memiliki karakteristik tertentu, hal ini dibuktikan bahwa setiap pendukung tidak mesti berada pada tempat yang sama, karena khalayak dapat bersifat menentang atau mendukung sesuatu dalam mencapai objektivitas. Sehingga komunikasi politik dapat berjalan di kehidupan masyarakat dan masyarakat dapat terpengaruh dengan adanya strategi kampanye politik yang dibangun.

Kampanye juga merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Jika dihubungkan dengan hasil penelitian penulis maka kegiatan kampanye yang diadakan dalam rentang waktu yang telah dirancang secara bertahap dengan tujuan mempengaruhi masyarakat tidak berjalan secara maksimal karena tempat diadakan kampanye jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya kegiatan kampanye, akibatnya banyak masyarakat yang tidak terpengaruh kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

2. Langkah-langkah pelaksanaan kampanye

Dalam studi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye, Assifi dan French dalam (Hafied Cangara 2016:248-249) menyusun delapan langkah yang dapat dilakukan

dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yakni : menganalisis masalah, menganalisis khalayak, merumuskan tujuan, memilih media, mengembangkan pesan, merencanakan produksi media, merencanakan manajemen program, monitoring dan evaluasi.

4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018

1. Faktor Internal

a. Faktor teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syahrini selaku KPPS Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak mengenai rendahnya partisipasi politik masyarakat pada saat Pilkada pada tahun 2018 yang lalu, beliau menjawab :
“kalau saya lihat, kebanyakan para pemilih tidak ikut berpartisipasi pada pilkada kali ini dikarenakan dari urusan pribadi mereka, ya, Rata-rata alasan dari mereka adalah karena faktor pekerjaan, faktor ada urusan di luar kota, ada yang beralasan sakit dan banyak lagi. Tapi rata-rata dari alasan mereka tidak ikut memilih karena alasan pekerjaan.”(Wawancara dengan ibu Syahrini 7 Februari 2019)

Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang di sampaikan oleh salah satu sekretaris desa selemak yaitu Bapak Faisal. Saat ditanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak pada saat pilkada tahun 2018. Beliau mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak kalau menurut saya mungkin lebih karena pekerjaan dari masyarakat, dimana mereka beranggapan, ah dari pada saya repot-repot memilih lebih baik saya berjualan kan dapat meningkatkan pendapatan.”(Wawancara 7 Februari 2019)

Sedangkan menurut salah satu pengawas TPS Riki Saputra saat ditanya mengenai permasalahan yang sama bapak Riki mengatakan bahwa :

“ Faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat sebenarnya ada banyak, pertama kalau menurut saya lihat lebih kepada

kurangnya kepedulian masyarakat tentang hak politik yang dimiliki, mereka beranggapan tidak ada manfaatnya menggunakan hak politik tersebut. Kadang-kadang juga masyarakat itu suara saya cuma satu dan itu tidak akan berpengaruh jadi lebih baik saya tidak memilih dan memilih untuk bekerja atau alasan lain seperti sakit.” (Wawancara 12 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Selamak Kecamatan Hamparan Perak seperti Ibu Norma saat ditanya mengapa dia tidak ikut memilih pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018, dia mengatakan

“Pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur saya lebih memilih untuk beristirahat di rumah soalnya saya dalam keadaan tidak enak badan, jadi saya malas mau datang ke TPS.”(Wawancara 12 Februari 2019)

b. Faktor Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud yang sehari-harinya bekerja sebagai petani saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, menurut Bapak Mahmud mengatakan :

“Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu saya tidak ikut memilih karena saya ada pekerjaan, namanya juga pekerja kasar kalau tidak bekerja tidak dapat uang, makanya saya lebih memilih bekerja dari pada saya datang ke TPS.” (wawancara 15 Februari 2019)

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Ibu Eka pedagang ia mengatakan :

“Saya tidak ada waktu datang ke TPS untuk ikut memilih soalnya saya pagi-pagi sudah harus berangkat kepajak untuk jualan, karena kalau saya tidak jualan gak punya uang, sehingga saya lebih memilih jualan.”(Wawancara 15 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas jelas bahwa alasan ekonomi atau pekerjaan menjadi pertimbangan yang sangat sulit di tinggalkan mengingat pekerjaan yang dijalanninya menuntut agar mereka tetap hadir meskipun sedang ada pesta demokrasi yang berlangsung, namun itu tidak menjadi penting jika sudah menyangkut dengan urusan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu KPPS desa Selemak dengan ibu syahrini mengatakan bahwa penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur SUMUT 2018 menurutnya :

“kalau faktor administrasi memang ada pengaruhnya ini diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal ada juga pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT. Mengapa itu terjadi misalnya sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT ini dikarenakan keluarga tidak mengurus yang namanya akte meninggal.”(Wawancara 7 Februari 2019)

Selain faktor yang disampaikan oleh ketua KPPS mengenai pemilih ganda, pemilih yang berpindah tempat tinggal dan pemilih yang meninggal. Faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan undangan sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimilikinya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Faisal selaku sekretaris Desa Selemak, saat ditanya faktor apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018 yang lalu ia mengatakan ;

“Kalau saya lihat ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, pertama kalau saya lihat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, jadi mau tidak mau mereka ini tidak ikut memilih karena masyarakat malas untuk mengurus-ngurus kartu undangan tersebut.”
(Wawancara 7 Februari 2018)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Riki Saputra selaku pengawas TPS saat ditanyak mengenai faktor apa yang menyebabkan

banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Desa Selemak, menurut beliau :

“banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang lalu itu dipengaruhi oleh faktor pendataan, pendataan itu kalau saya lihat banyak yang tidak sinkron, misalnya saja ada masyarakat yang sudah meninggal namun dapat kartu undangan begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak diberi kartu undangan. Memang masyarakat disini kalau saya lihat jika mereka betul-betul tidak diberi kartu undangan mereka tidak mau hadir ke TPS.”(Wawancara 12 Februari 2019)

b. Faktor Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPPS Desa Selemak saat ditanya mengenai adanya sosialisasi sebelum terlaksanakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ia mengatakan :

“Kalau dari kami sosialisasinya hanya bersifat pengetahuan terhadap ketua RT untuk menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya.” (wawancara 7Februari 2019)

Dalam hal sosialisasi yang memiliki peran penting sebenarnya bukan KPPS melainkan para calon dan partai politik karena para calon yang secara langsung mempunyai kepentingan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih mereka, selain itu partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal ini karena partai politik merupakan kendaraan para calon tersebut.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh KPPS Desa Selemak bahwa sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakat memang kurang efektif mengingat

biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, sehingga cenderung masyarakat kurang mengenal para calon peserta pemilu dan visi misi yang ingin disampaikan. Sehingga pada akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka.

Seperti Ibu Beyek yang saat ditanya alasannya sehingga tidak menggunakan hak pilihnya beliau mengatakan :

“Soalnya saya bingung siapa yang mau dipilih karena kedua calon saya tidak tahu apa visi misinya, sehingga waktu pemilihan saya tidak ikut memilih karena saya tidak mau saya salah pilih, makanya saya netral dan memilih tidak hadir ke TPS.”(Wawancara 15 Februari 2019)

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh bapak Mahmud yang mengatakan :

“saya tidak ikut pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT pada waktu itu soalnya saya tidak tahu apa program-program yang ingin dilaksanakan oleh para calon, paling yang saya tahu cuma lihat spanduk-spanduk gambar calon.”(Wawancara 15Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat atau informan di atas jelas bahwa mereka kurang mendapatkan sosialisasi mengenai program-program atau visi misi yang ingin disampaikan oleh para calon kandidat sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih yang mereka miliki, dan jika adanya sosialisasi yang mendalam dari kandidat atau tim sukses dari kandidat terhadap masyarakat kemungkinan besar masyarakat yang tidak ikut memilih karena faktor ini bisa berubah pikiran dan mau menggunakan hak pilih yang mereka miliki.